	NOMOR SOP	W.13.SDM. SDM.1.0T.02.02-30		
	TANGGAL PEMBUATAN	23 Juli 2018		
	TANGGAL REVISI	18 Juni 2024		
	TANGGAL EFEKTIF	18 Juni 2024 18 Juni 2024		
PENGAYOMAN	DISAHKAN OLEH	KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM		
		DAN HAM JAWA TENGAH		
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia		#KUMHAMPASTI		
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah		Ditandatangani secara elektronik oleh :		
		Rinto Gunawan Sitorus		
		NIP 198208292008011001		
SUB BAGIAN TATA USAHA	NAMA SOP	PENGAJUAN PENCAIRAN GAJI INDUK		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :			
 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara; 	 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. Memahami tata cara dan peraturan penatausahaan, pembukuan, pertanggungjawaban, dan pelaporan anggaran. 			
 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM; 	pertanggungjuwasan, dan p			
Kerja Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata	PERALATAN / PERLENGKA			
 Kerja Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM; 		PAN:		
Kerja Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM; KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKA	PAN:		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN GAJI INDUK

	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
No		JF / PPABP	Bendahara	Kepala Subbagian TU/PPSPM	Kepala Badiklat / PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	JF/PPABP Memproses Pembuatan Gaji Induk di Aplikasi Gaji Web Kemenkeu					Data, Berkas Elektronik	60 menit	Data, Berkas Elektronik	
2	JF/PPABP Melakukan pencetakan Gaji dan Tanda Tangan Elektronik di Aplikasi Gaji Web Kemenkeu					Data, Berkas Elektronik	30 menit	Data, Berkas Elektronik	
3	JF/PPABP Mengajukan Persetujuan Gaji ke Bendahara di Aplikasi Gaji Web Kemenkeu. Jika disetujui akan diajukan ke PPK, jika tidak akan dikembalikan ke PPABP untuk di perbaiki.	Т		Y		Data, Berkas Elektronik	30 menit	Data, Berkas Elektronik	
4	Bendahara Mengajukan Persetujuan Gaji ke PPK di Aplikasi Gaji Web Kemenkeu. Jika disetujui akan diajukan ke PPSPM, jika tidak akan dikembalikan ke Bendahara untuk di perbaiki.			т	Y	Data, Berkas Elektronik	30 menit	Data, Berkas Elektronik	
5	Bendahara Mengajukan Persetujuan Gaji ke PPSPM di Aplikasi Gaji Web Kemenkeu. Jika disetujui akan diajukan ke KPPN, jika tidak akan dikembalikan ke PPK untuk di perbaiki.	т				Data, Berkas Elektronik	30 menit	Data, Berkas Elektronik	
6	JF/PPABP Melakukan Rekon Gaji ke KPPN di Aplikasi Gaji Web Kemenkeu. Jika disetujui akan diproses SPM pada Aplikasi SAKTI, jika tidak akan dikembalikan ke PPSPM untuk di perbaiki.	Y		Y		Data, Berkas Elektronik	60 menit	Data, Berkas Elektronik	
7	Bendahara Memproses SPM di Aplikasi SAKTI					Data, Berkas Elektronik	60 menit	Data, Berkas Elektronik	
8	JF/PPABP Mengecek diterima dan tidaknya SP2D melalui Aplikasi Omspan					Data, Berkas Elektronik	30 hari	Data, Berkas Elektronik	